

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

YANG AKAN DISUSUN TAHUN 2011 – 2014

NO. UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT	RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1998 TTTG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT)	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA KOORDINASI PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA KOORDINASI PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS)			
2.	RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERWALIAN,			RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN	

NO. UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
3. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LANJUT (PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA)	PENGASUHAN, DAN PENGANGKATAN ANAK	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA. (PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA)		PENGANGKATAN ANAK (PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 110/110/K/2009 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK)	
4.	RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER				

NO. UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
	PENDANAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN (PELAKSANAAN PASAL 36 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN)				
5. RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG)					
6. RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG UNDIAN (PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN)				RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IZIN UNDIAN (PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14A/HUK/2006	

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
7.		RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH. (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1981 TENTANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN)			TENTANG IZIN UNDILAN)	
8.			RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMERIAN PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN BAGI PENERIMA GELAR, TANDA JASA,			

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
9.			DAN TANDA KEHORMATAN.		RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KAT).	RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KAT (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 06/PEGHUK/2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KAT).
10.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGGAJIAN USUL GELAR PAHLAWAN NASIONAL.	
11.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN KARANG	

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
12.					TARUNA (PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 77/HUK/2010 TENTANG PEDOMAN KARANG TARUNA). RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 84/HUK/1998 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN).	
13					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERDAYAAN PERAN KELUARGA	

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
14.					(PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 19/HUK/2001 TENTANG PEMBERDAYAAN PERAN KELUARGA).	
					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ZIARAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN/ MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 23/IIUK/1992 TENTANG ZIARAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN/MAKAM PAHLAWAN NASIONAL.)	

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
13.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 42/HUK/2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT).	

MENTERI SOSIAL,
 REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI